

# **ANALISA TRIWULANAN: Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran**

*Tim Penulis Laporan Triwulanan, Bank Indonesia*

## **I.1 EVALUASI KINERJA TRIWULAN II - 2005**

Selama triwulan II-2005, kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. Kestabilan makroekonomi tetap terjaga meskipun terdapat tekanan depresiasi terhadap nilai tukar dan inflasi yang cenderung meningkat. Kegiatan ekonomi meningkat lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan pola ekspansi yang lebih berimbang, ditandai dengan peran investasi yang semakin meningkat. Laju inflasi dalam triwulan II-2005 menunjukkan peningkatan, terutam didorong oleh kenaikan BBM.

Dalam kondisi demikian, upaya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro menjadi penting untuk dilakukan. Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Pada sisi lain, perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan dan pasar modal menunjukkan kinerja yang semakin meningkat sehingga perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi semakin besar.

Perekonomian Indonesia triwulan II-2005 tumbuh sebesar 5,5 - 6,0% (yoy) dengan pertumbuhan investasi yang relatif tinggi. Ekspor tumbuh moderat sementara impor masih tumbuh tinggi terkait dengan tingginya kegiatan ekonomi domestik khususnya investasi. Sementara itu, konsumsi khususnya konsumsi swasta masih tetap tumbuh tinggi dengan indikasi kecepatan yang melambat. Di sisi eksternal, sejalan dengan tingginya pertumbuhan impor, kinerja transaksi berjalan diperkirakan akan mengalami defisit lebih cepat dari perkiraan semula. Neraca modal tetap menunjukkan defisit karena tingginya pembayaran utang luar negeri sektor perbankan dan perusahaan. Secara keseluruhan kinerja NPI yang mengalami tekanan tersebut juga tercermin pada meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Inflasi IHK masih tetap terkendali meskipun cenderung berada pada *level* yang cukup tinggi yaitu mencapai 7,42% (yoy). Secara fundamental, tingginya inflasi disebabkan oleh masih tingginya ekspektasi inflasi terkait dengan kebijakan kenaikan *administered prices* dan perkembangan nilai tukar yang cenderung melemah. Faktor eksternal khususnya melemahnya

nilai tukar memberikan tekanan terhadap inflasi namun dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya. Sementara itu inflasi inti relatif stabil pada *level* 7% (yoy).

Nilai tukar rupiah pada triwulan II-2005 mengalami tekanan depresiasi dengan volatilitas yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara rata-rata rupiah terdepresiasi sebesar 3,0% menjadi Rp9.556/USD dan disertai dengan peningkatan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara fundamental, tekanan terhadap rupiah tersebut terkait dengan memburuknya kinerja neraca pembayaran disamping adanya faktor sentimen penguatan dolar AS secara global serta terus meningkatnya harga minyak. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan valas semakin meningkat baik untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri maupun dalam rangka pembalikan arus modal. Sementara itu, pasokan valas yang lebih *sustainable* masih terbatas. Kebijakan moneter dan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar yang telah ditempuh Bank Indonesia telah dapat menahan pelemahan rupiah secara temporer, namun langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran nilai tukar masih perlu dilanjutkan untuk menahan pelemahan rupiah lebih lanjut.

Untuk mengendalikan laju inflasi agar sesuai dengan sasaran jangka menengahnya, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter untuk mengendalikan faktor-faktor yang menjadi determinan utama inflasi. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) tetap dilanjutkan melalui penyerapan kelebihan likuiditas secara optimal yang memungkinkan kenaikan suku bunga SBI secara gradual dan terukur. Langkah kebijakan moneter tersebut diperkuat dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang dirumuskan dalam paket stabilisasi Rupiah dan *Road map* Pengendalian Inflasi yang telah mendapatkan komitmen pemerintah. Sejalan dengan kebijakan moneter yang ketat tersebut, suku bunga SBI secara bertahap naik secara signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Langkah tersebut juga diikuti dengan dan pelaksanaan lelang SBI dengan frekuensi mingguan sejak bulan Mei 2005. Pada akhir triwulan II-2005 rata-rata tertimbang SBI 1 dan 3 bulan mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 8,25% dan 8,05%. Kenaikan instrumen moneter tersebut telah ditransmisikan dengan besaran yang berbeda pada suku bunga PUAB *overnight*.

Di sektor perbankan, stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara dengan dukungan stabilitas moneter. Kinerja industri perbankan terus membaik dengan profitabilitas dan pemodalannya yang memadai sehingga mampu meningkatkan fungsi intermediasinya. Pada dasarnya risiko-risiko usaha perbankan cukup moderat dengan kecenderungan meningkat. Terdapat potensi peningkatan risiko kredit dan risiko pasar sebagai dampak meningkatnya pemberian kredit dan peningkatan suku bunga. Namun demikian, dalam jangka pendek diperkirakan tidak terdapat gejolak yang membahayakan stabilitas sistem perbankan.

Tabel I.1. Indikator Ekonomi Makro &amp; Perbankan

Indikator	2004				2005
	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II
<b>IHK (%)</b>					
Triwulanan ( <i>quarter to quarter</i> )	2,35	0,51	2,51	3,19	1.05
Tahunan ( <i>year on year</i> )	6,83	5,06	6,40	8,81	7.42
<b>PDB (% pertumbuhan, tahunan)</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5 – 6,0**</b>
<i>Dari sisi permintaan :</i>					
Konsumsi Total	5,3	5,1	3,8	3,2	3,1 – 3,6**
Investasi Total	13,1	19,7	18,3	15,0	14,9 – 15,4**
Ekspor	2,0	17,1	27,1	13,4	10,3 – 10,8**
<b>Sektor eksternal :</b>					
Ekspor non migas (fob, % pertumbuhan tahunan)	9,2	23,3	9,8	39,5***	1,2***
Impor non migas (c&f, % pertumbuhan tahunan)	26,6	30,7	4,6	13,2****	23,7***
Transaksi berjalan (juta USD)	666	2.299	197**	2.467**	-8. 25**
Posisi Utang LN (juta USD)	133.378	132.798	137.024	134.937***	138.560***
<b>Suku bunga (%)<sup>1)</sup></b>					
SBI 1 bulan	7,34	7,39	7,43	7,44	8,18
PUAB ( <i>overnight</i> )	4,24	4,13	3,76	5,95	7,97
Deposito 1 bulan	6,23	6,31	6,43	6,50	6,76****
Kredit modal kerja	14,10	13,80	13,41	13,31	13,20****
Kredit investasi	14,64	14,33	14,05	13,78	13,68****
Kurs (Rp/USD), nominal akhir periode	9.400	8.420	9.335	9.487	9.556
<b>Real Effective Exchange Rate (REER)<sup>2)</sup>, 2003=100</b>	<b>92,12</b>	<b>94,74</b>	<b>91,19</b>	<b>93,84</b>	<b>93,03</b>
<b>Kurs rata-rata</b>	<b>9.005</b>	<b>9.163</b>	<b>9.120</b>	<b>9.279</b>	<b>9.556</b>
DPK (triliun Rp.)	912.8	926.4	963.1	959.3	986.7
Kredit (triliun Rp.) - termasuk <i>channeling</i>	528.7	555.1	595.1	617.8	650.8
ROA (%)	2.7	3.0	3.5	3.4	3.3
CAR (%)	20.9	20.5	19.4	21.7	20.0
					650.8

1) Rata-rata tertimbang akhir periode  
2) REER adalah indeks nilai tukar rupiah per mata uang negara mitra dagang yang dibobot dengan total ekspor dan impor dari 8 mitra dagang utama Indonesia.  
\* : Perkiraan Bank Indonesia menggunakan tahun dasar 2000  
\*\* : Perkiraan Bank Indonesia  
\*\*\* : Angka Januari 2005  
\*\*\*\* : Angka Mei 2005  
Sumber : Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Perkembangan yang relatif membaik tersebut terlihat juga pada kinerja perbankan syariah dan BPR. Dari sisi kebijakan, perbaikan kondisi perbankan yang stabil tersebut sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang terus melanjutkan langkah-langkah dalam menjaga dan memperkuat stabilitas sistem perbankan serta terus mengupayakan peningkatan intermediasi. Dalam periode yang sama, Bank Indonesia juga akan terus mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern bank untuk meminimalkan risiko-risiko serta mengakselerasikan proses konsolidasi untuk memperkuat struktur industri perbankan.

Perkembangan sistem pembayaran nasional, baik tunai dan non tunai menunjukkan kinerja yang tetap aman dan terjaga stabilitasnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pembayaran tunai selama triwulan II-2005 yang diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui peningkatan efektivitas distribusi uang, pelaksanaan program kerjasama penukaran uang pecahan kecil (PPUK), penanggulangan meluasnya uang palsu melalui upaya peningkatan pemahaman terhadap ciri-ciri keaslian uang, pengedaran uang rupiah khusus, pengeluaran uang emisi baru serta pengembangan Sistem Informasi Pengedaran Uang (SIPU).

Di sisi pembayaran non tunai, selama triwulan II-2005 kebijakan diarahkan pada upaya pengurangan risiko, peningkatan efisiensi sistem pembayaran serta perlindungan konsumen di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai kegiatan antara lain pengawasan sistem pembayaran, pengembangan *Failure to Settle Scheme* (FtS) yakni skema/mekanisme mengatasi kegagalan peserta kliring dalam memenuhi kewajiban *settlement*, penerapan Sistem Kliring Nasional, serta penyelenggaraan bulan pengaduan konsumen pengguna alat pembayaran berbasis kartu (APMK) yang merupakan kerja sama BI dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

## **1.2 PROSPEK SERTA ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN**

Kedepan, prospek ekonomi makro dalam triwulan III-2005 dan keseluruhan tahun 2005 diperkirakan masih akan membaik. Pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2005 diperkirakan akan menuju batas atas kisaran 5,5-6% (yoy) dengan pola ekspansi yang semakin berimbang dengan komponen investasi dan ekspor menjadi tumpuan akselerasi pertumbuhan, sementara konsumsi relatif stabil. Namun demikian, membaiknya perkiraan kinerja perekonomian ini masih akan menghadapi sejumlah risiko baik yang datang dari internal maupun eksternal sehingga memerlukan langkah-langkah antisipatif. Kinerja neraca pembayaran diperkirakan mengalami tekanan meskipun transaksi berjalan dan transaksi lalu lintas modal (LLM) masih menunjukkan surplus. Kondisi NPI tersebut mencerminkan masih terdapatnya potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2005.

Sementara itu, tekanan inflasi diperkirakan masih tetap tinggi terutama disebabkan oleh meningkatnya berbagai kebijakan *administered* dan pola inflasi makanan yang sedikit lebih tinggi dari pola tahun sebelumnya. Inflasi IHK tahun 2005 diperkirakan akan berada pada *level* di atas sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu inflasi inti diperkirakan relatif stabil sejalan dengan asumsi nilai tukar yang sedikit melemah dan pertumbuhan ekonomi yang

masih di bawah tingkat potensialnya. Namun demikian, ekspektasi inflasi diperkirakan masih berpotensi untuk meningkat dan berada pada *level* yang tinggi.

Mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro dan inflasi ke depan, kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi makro guna memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang ada. Sejalan dengan itu, kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) akan tetap dilanjutkan guna mengendalikan pencapaian sasaran inflasi pada jangka menengah. Secara operasional, kebijakan tersebut ditempuh dengan cara menetapkan *reference rate* (*BI Rate*) sebesar 8,5% selama triwulan III-2005. Penyesuaian terhadap *reference rate* tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan. *Stance* kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan penyerapan eksekutif likuiditas perbankan secara optimal melalui instrumen moneter yang ada.

Selain itu, dari sisi kebijakan stabilitasi rupiah, disamping upaya mempercepat implementasi opsi kebijakan manajemen permintaan dan penawaran valas, Bank Indonesia juga terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah fundamental terkait dengan upaya meningkatkan pasokan valas yang *sustainable* dari ekspor dan FDI dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah baik melalui koordinasi kebijakan makro maupun dalam kerangka pengendalian inflasi sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Di bidang perbankan, kebijakan pada triwulan mendatang akan tetap diarahkan pada upaya memelihara dan memperkuat stabilitas sistem perbankan dan mendorong peran intermediasi perbankan dalam perekonomian. Sasaran pokok tersebut akan terus diupayakan melalui rangkaian kebijakan peningkatan efektivitas pengawasan bank, perbaikan manajemen dan infrastruktur perbankan dan akselerasi konsolidasi perbankan. Guna meminimalkan risiko-risiko usaha yang dihadapi, Bank Indonesia terus akan mengarahkan perbankan untuk membenahi tata kelola termasuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal. Selanjutnya, untuk memperkuat struktur industri perbankan, Bank Indonesia akan mengakselerasikan proses konsolidasi perbankan. Sementara itu, Pemerintah dan Bank Indonesia bekerjasama untuk menyiapkan jaring pengaman keuangan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut terutama diupayakan melalui penyiapan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khususnya dalam penyiapan peraturan pelaksanaan dan sosialisasi kepada perbankan dan masyarakat dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Keuangan yang akan memuat mengenai peran dan tanggung-jawab serta mekanisme koordinasi lembaga terkait dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Di bidang sistem pembayaran tunai, kebijakan triwulan mendatang tetap diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang

cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan melakukan perencanaan kebutuhan masyarakat atas uang kartal serta pemantauan distribusi dan kecukupan persediaan kas. Di samping itu, langkah-langkah penanggulangan uang palsu tetap dilanjutkan antara lain melalui perluasan jejaring dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta meningkatkan publikasi dalam rangka pengenalan masyarakat atas ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media elektronik dan media cetak.

Di bidang sistem pembayaran non tunai, kebijakan triwulan mendatang tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya-upaya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran demi terciptanya sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman, dan handal guna mendukung kestabilan sistem moneter dan sistem keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah lanjutan dalam upaya meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi serta kehandalan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa sistem pembayaran. Dalam periode ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan implementasi beberapa program yang telah disusun pada tahun 2004 dan penyusunan ketentuan antara lain pelaksanaan *Failure to Settle* (FtS), Sistem Kliring Nasional (SKN), pelaksanaan pengawasan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu dan sosialisasi untuk memperlancar implementasi Daftar Hitam Nasional.